

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang menyiapkan seseorang untuk bekerja pada bidang tertentu. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang memfasilitasi seseorang dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap sebagai calon tenaga kerja pada bidang keahlian tertentu (Oviawe, 2017, hlm. 7). Sependapat dengan Oviawe, Pavlova (2009) menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang tujuan utamanya menyiapkan lulusan untuk bekerja. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja (Djarmiko, 2013, hlm.16). Berdasarkan ketiga pendapat di atas, dapat dimaknai bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan seseorang untuk menjadi calon tenaga kerja pada bidang keahlian tertentu dengan cara memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan di tempat kerja.

Pendidikan kejuruan dalam sistem pendidikan di Indonesia merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik utamanya untuk bekerja pada bidang keahlian tertentu (pasal 15 UU Nomor 20 tahun 2003). Dilihat dari struktur kelembangaan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, pendidikan kejuruan dilaksanakan dalam bentuk pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan pendidikan kejuruan yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan sekolah. SMK bertugas mempersiapkan peserta didiknya untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional (Kepmen Dikbud No. 0490/U/1992). SMK bertujuan untuk: (a) menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional; (b) menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, mampu berkompetisi dan mampu mengembangkan diri; (c) menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan datang; dan (d) menyiapkan

tamatan agar menjadi warga Negara yang produktif, adaptif, dan kreatif (Pasal 3 ayat 2 PP Nomor 29 tahun 1990).

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang utamanya bertujuan untuk menyiapkan peserta didik sebagai calon tenaga kerja terampil pada bidang keahlian tertentu. Setiap lulusan dari pendidikan kejuruan diharapkan: 1) mampu menjawab tuntutan kebutuhan dunia kerja dalam hal tenaga kerja yang produktif, 2) mampu beradaptasi, dan 3) memiliki keterampilan. Implikasinya, lembaga pendidikan kejuruan harus melaksanakan proses pendidikan (proses pembelajaran) yang mampu memfasilitasi peserta didiknya untuk menguasai kompetensi pada bidangnya. Begitu juga dengan SMK. SMK harus menyelenggarakan proses pembelajaran yang mengarah pada proses penguasaan kompetensi kerja oleh peserta didiknya. Pembelajaran di SMK harus dilakukan dengan menerapkan landasan psikologis behaviorisme dan *mastery learning* (Kuswana, 2013, hlm. 203). Kedua landasan tersebut memberi arahan bahwa tujuan akhir dari pembelajaran adalah dimilikinya kompetensi secara utuh sebagai kemampuan (*ability*) nyata yang dapat didemonstrasikan oleh setiap peserta didik. Proses pembelajaran juga harus dilaksanakan dengan mengacu pada tuntutan kompetensi kerja sesuai bidang keahliannya.

SMK memiliki peran yang sangat besar dalam penyiapan calon tenaga kerja, sehingga mulai tahun 2005 pemerintah (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkecil kesenjangan keterampilan. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan perbandingan atau rasio antara peserta didik SMK dengan SMA. Rasio antara peserta didik SMK dengan SMA direncanakan dari 60:40 pada tahun 2009 menjadi 50:50 pada tahun 2015, dan akhirnya menjadi 70:30 pada tahun 2025. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar pada tahun tersebut diharapkan rasio antara jumlah lulusan SMK dan SMA yang ada di pasar kerja domestik sebesar 30%:20% (Kadir, Nirwansyah, and Bachrul, 2016, hlm. 16). Kebijakan peningkatan ratio antara peserta didik SMK dengan SMA, menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah SMK. Sampai tahun 2017 jumlah SMK yang ada di Indonesia sebanyak 13,710 sekolah, yang terdiri atas 3.519 (25,67%) sekolah negeri dan 10.191 (74,33%) sekolah swasta (Kemdikbud, 2017). Di Jawa Barat, jumlah SMK

**Y a y a t, 2019**

**MODEL PEMBIAYAAN PADA PENDIDIKAN KEJURUAN (Analisis Biaya Satuan Pendidikan Kejuruan Di SMK yang Berbasis Pada Standar Kebutuhan Kompetensi)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sebanyak 2.846 sekolah (280 negeri dan 2.566 swasta), dan di Kota Bandung jumlah SMK yang ada sebanyak 126 sekolah (16 Negeri dan 110 Swasta). Jumlah tersebut masih sedikit di bawah SMA yang berjumlah 136 sekolah (27 Negeri dan 109 Swasta).

Mengingat SMK sebagai lembaga pendidikan yang menyiapkan lulusan sebagai calon tenaga kerja, SMK menyelenggarakan program pendidikan untuk berbagai Bidang Keahlian sesuai dengan keahlian yang ada di dunia kerja (Industri). Berdasarkan spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK), program pendidikan kejuruan yang diselenggarakan di SMK terdiri atas sembilan kelompok Bidang Keahlian (BK), 48 Program Keahlian (PK), dan 142 Kompetensi Keahlian (KK). Seluruh Kompetensi Keahlian tersebut ada 108 KK yang dilaksanakan untuk program tiga tahun, dan 34 KK untuk program 4 tahun. SMK di Kota Bandung, menyelenggarakan program pendidikan untuk 7 kelompok Bidang Keahlian, yaitu: (1) Teknologi dan Rekayasa, (2) Teknologi Informasi dan Telekomunikasi, (3) Kesehatan, (4) Agribisnis dan Agroteknologi, (5) Bisnis dan Manajemen, (6) Pariwisata, (7) Seni Rupa dan Seni Pertunjukkan. Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa merupakan kelompok Bidang Keahlian yang banyak diselenggarakan pada SMK. Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa dilaksanakan di 66 SMK (10 SMK Negeri dan 56 SMK Swasta). Adapun Program Keahlian yang diselenggarakan di SMK terdiri atas Program Keahlian: a) Teknik Bangunan, b) Teknik Ketenagalistrikan, c) Teknik Pendingin dan Tata Udara, d) Teknik Mesin, e) Teknologi Pesawat Udara, f) Teknik Tekstil, g) Teknik Kimia, h) Teknik Otomotif, dan i) Teknik elektronika.

Penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan sumber daya (sumber daya pendidikan). Sumber daya pendidikan seperti tertuang dalam UU Sisdiknas Pasal 1 ayat 23, diantaranya adalah: 1) tenaga pendidik dan kependidikan, dan 2) sarana dan prasarana pendidikan. Proses pendidikan akan berjalan dengan baik dan berkualitas apabila ditunjang oleh ketersediaan dan digunakannya sumber daya pendidikan yang baik dan memadai. Implikasi dari penyediaan dan penggunaan sumber daya pendidikan tersebut adalah diperlukannya biaya (biaya pendidikan). Biaya dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting.

**Y a y a t, 2019**

*MODEL PEMBIAYAAN PADA PENDIDIKAN KEJURUAN (Analisis Biaya Satuan Pendidikan Kejuruan Di SMK yang Berbasis Pada Standar Kebutuhan Kompetensi)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Hampir tidak ada satupun kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pendidikan terlepas dari biaya. Proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan tanpa adanya biaya (Supriadi, 2010, hlm.3). Oleh karena itu, dalam operasionalnya pendidikan tidak dapat dilepaskan dari masalah biaya (Fattah, 2009, hlm. 6). Kedua pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa komponen biaya dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan komponen input pendidikan yang harus disediakan.

Biaya merupakan salah satu di antara sejumlah faktor penentu terbentuknya kualitas pendidikan. Pendidikan akan berkualitas apabila didukung oleh ketersediaan biaya yang memadai. Besarnya biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pendidikan berkorelasi dan berkontribusi terhadap kualitas proses dan hasil pembelajaran (Fattah, 2009; Sugiarta, 2010; Mukhid 2012; Sanjiwani, 2012; dan Brown and Kurzweil, 2018). Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa baik tidaknya kualitas proses dan hasil pendidikan ditentukan oleh besar tidaknya biaya yang dikeluarkan. Semakin besar biaya yang dikeluarkan, akan semakin baik kualitas proses dan luaran yang dihasilkan. Peningkatan pada jumlah biaya yang dibelanjakan akan meningkatkan kualitas pendidikan. Brown and Kurzweil (2018, hlm. 1) menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak mungkin dicapai apabila tidak dibarengi dengan peningkatan biaya yang dibayarkan.

Biaya pendidikan merupakan biaya bagi masyarakat atas perkembangan dan berlakunya sistem pendidikan (Hallak, 1985). Biaya pendidikan diartikan sebagai sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan (PP Nomor 48 tahun 2008). Biaya pendidikan (*education costs*) adalah semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk uang, barang maupun tenaga yang dapat dinilai dengan uang (Supriadi, 2010, hlm. 3). Biaya pendidikan adalah sumber daya pendidikan yang berupa uang (*budgetair*) maupun tidak berupa uang (*non budgetair*) yang dibayarkan untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan terdiri atas: (1) biaya investasi, (2) biaya operasi, dan (3) biaya personal (PP No. 19 tahun 2005). Adapun dalam PP No 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dijelaskan bahwa biaya pendidikan meliputi: 1) biaya satuan pendidikan yang terdiri atas: a) biaya investasi lahan dan bukan lahan,

**Y a y a t, 2019**

**MODEL PEMBIAYAAN PADA PENDIDIKAN KEJURUAN (Analisis Biaya Satuan Pendidikan Kejuruan Di SMK yang Berbasis Pada Standar Kebutuhan Kompetensi)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

b) biaya operasi personal dan non personal, c) bantuan biaya pendidikan, dan d) beasiswa peserta didik; 2) biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang terdiri atas a) biaya investasi lahan dan bukan lahan, dan b) biaya operasi personal dan non personal; dan 3) biaya pribadi peserta didik/biaya personal, yaitu biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan menggunakan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah, industri/perusahaan, swasta, peserta didik, bahkan dari donor luar negeri (Bolina, 1996; Wolf, A. and Erdle, A., 2009, dan ADB, 2009). Di Indonesia, pembiayaan yang digunakan pada SMK adalah pembiayaan yang bersumber dari pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat dan keluarga. Sugandi (2011) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan SMK, khususnya SMK Negeri, menggunakan biaya yang bersumber dari: 1) pemerintah pusat melalui APBN, 2) pemerintah daerah melalui APBD, dan 3) masyarakat yang dikelola oleh Komite Sekolah. Selanjutnya, Sugandi (2011) menjelaskan bahwa penggunaan biaya dalam penyelenggaraan pendidikan di SMK lebih dari 65% menggunakan biaya dari pemerintah pusat, 30% dari pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dan sekitar 5% menggunakan biaya yang berasal dari masyarakat. Supriadi (2010) dalam penelitiannya tentang satuan biaya pendidikan dasar dan menengah negeri dalam lingkup nasional, mengemukakan bahwa sumber pembiayaan pendidikan kejuruan berasal dari pemerintah (pusat dan daerah), orang tua, masyarakat dan sumber lainnya. Khusus untuk SMK Negeri, Supriadi (2010) menemukan kecenderungan bahwa sumber pembiayaan terbesar berasal dari pemerintah (pusat dan daerah), yaitu sebesar 78,9%. Adapun sumber biaya pendidikan yang berasal dari orang tua hanya sebesar 16,9 %, dan kontribusi dari masyarakat dan sumber lainnya hanya 4,2%. Penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Fattah (2009), yakni tentang pembiayaan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Jawa Barat, juga memberikan gambaran bahwa sumber pembiayaan terbesar berasal dari pemerintah pusat, yaitu sebesar 90,73%, sedangkan kontribusi dari orang tua peserta didik sebesar 6,88%, dan kontribusi dari masyarakat dan sumber lain sebesar 0,40%. Berdasarkan kenyataan tersebut, ternyata sampai saat ini pembiayaan pendidikan

**Y a y a t, 2019**

*MODEL PEMBIAYAAN PADA PENDIDIKAN KEJURUAN (Analisis Biaya Satuan Pendidikan Kejuruan Di SMK yang Berbasis Pada Standar Kebutuhan Kompetensi)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

di Indonesia, khususnya pada lembaga pendidikan negeri masih tertumpu atau mengandalkan biaya yang bersumber dari pemerintah (pusat dan daerah). Sementara untuk lembaga pendidikan swasta, sumber biaya pendidikan utamanya berasal dari masyarakat (orang tua), sedangkan dana yang bersumber dari pemerintah bukan merupakan sumber dana yang utama.

Dalam sisi pengeluaran, dari penelitian tersebut pengeluaran terbesar digunakan untuk membayar biaya investasi, gaji, dan kesejahteraan personal. Sugandi (2011), menjelaskan bahwa dana yang diperoleh SMK digunakan untuk membayar biaya: a) investasi (lebih dari 80%), b) personal dan pengembangan SDM (sekitar 10%), c) perawatan (sekitar 5%), d) biaya non personal (sekitar 3%), dan e) pengeluaran terkecil (sekitar 2%) untuk pembiayaan bahan praktik. Adapun menurut Fattah (2009), biaya yang diperoleh oleh sekolah terbesar digunakan untuk pembayaran gaji dan kesejahteraan karyawan (81,46%), dan pengeluaran terkecil untuk pengelolaan sekolah (0,40%). Sementara, Supriadi (2010) menjelaskan bahwa sebagian besar (78-80%) dana yang diperoleh sekolah dari pemerintah digunakan untuk membayar gaji, dan sekitar 20-22% digunakan untuk membayar komponen non gaji. Apabila anggaran untuk membayar gaji menggunakan anggaran yang diperoleh dari pemerintah, maka sekitar 99,5% anggaran tersebut akan habis dan hanya kurang dari 1% yang digunakan untuk penyelenggaraan proses pembelajaran (Supriadi, 2010). Hasil penelitian Sugandi (2011), Fattah (2009), dan Supriadi (2010) di atas, menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan di Indonesia sampai saat ini bersumber dari pemerintah dan dalam penggunaannya sebagian besar untuk biaya investasi dan biaya operasional personal (gaji dan kesejahteraan personal). Sementara biaya operasi untuk pelaksanaan proses pembelajaran, utamanya untuk pengadaan Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP) masih kecil.

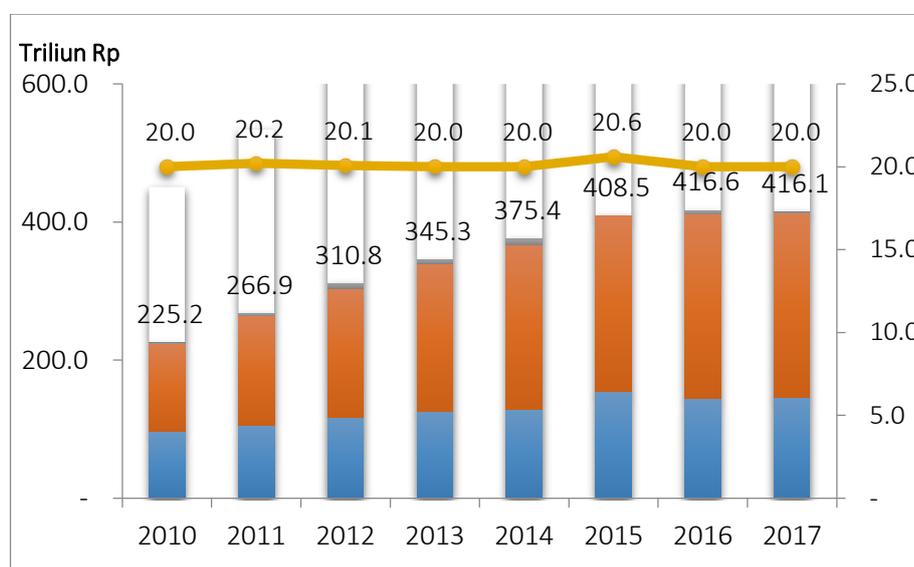
Amanat dari amandemen pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ayat (4), menegaskan bahwa pemerintah agar memprioritaskan dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang ada dalam pasal 49 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa dana pendidikan selain gaji

**Y a y a t, 2019**

*MODEL PEMBIAYAAN PADA PENDIDIKAN KEJURUAN (Analisis Biaya Satuan Pendidikan Kejuruan Di SMK yang Berbasis Pada Standar Kebutuhan Kompetensi)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran tersebut dalam pemenuhannya dilakukan secara bertahap (Penjelasan ayat (1) pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003). Proporsi anggaran 20% untuk sektor pendidikan ini diproyeksikan akan tercapai pada tahun 2009, karena sejak tahun 2005 pemerintah dan DPR sepakat untuk menetapkan kenaikan anggaran pendidikan sebesar 2,7% setiap tahunnya. Sejak tahun 2010 pemerintah telah menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Gambar 1.1 menunjukkan besarnya anggaran pendidikan yang dilakokasikan oleh pemerintah dari tahun 2010 sampai 2017.



Gambar 1.1. Anggaran Pendidikan di Indonesia Tahun 2010-2017  
(<http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id.xlsx>)

Dalam implementasinya, harapan seperti tertuang pada pasal 49 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tersebut tidak dapat terwujud, karena pada tanggal 20 Februari 2008 keluar Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007, yang menyatakan bahwa alokasi dana pendidikan 20% dari APBN dan 20% dari APBD tersebut termasuk untuk pembayaran gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Masuknya komponen gaji pendidik ke dalam pendanaan pendidikan sudah tentu akan membuat pendanaan pendidikan menjadi tidak efektif, karena alokasi biaya rutin khususnya pembayaran gaji dan tunjangan penyelenggara pendidikan termasuk pendidik dipastikan membengkak. Akibatnya, alokasi untuk operasional kegiatan pembelajaran menjadi berkurang (Rahmawati, 2015). Pendidik bukan hanya guru

Y a y a t, 2019

MODEL PEMBIAYAAN PADA PENDIDIKAN KEJURUAN (Analisis Biaya Satuan Pendidikan Kejuruan Di SMK yang Berbasis Pada Standar Kebutuhan Kompetensi)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

melainkan seluruh tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan (pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003). Alokasi anggaran untuk komponen biaya rutin, khususnya gaji yang dimasukkan dalam anggaran pendidikan, akan jauh lebih besar dibanding alokasi anggaran untuk kepentingan pelayanan dan peningkatan kualitas belajar mengajar.

Minimnya biaya yang dilakokasikan untuk sarana dan prasarana pendidikan menyebabkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah menjadi terbatas dan cenderung berkurang. Padahal, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran merupakan salah satu indikator dari pencapaian pembangunan pendidikan (Rahmawati, 2015). Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, merupakan salah satu permasalahan yang dialami oleh pendidikan kejuruan, disamping persoalan lain seperti kurang dan tidak meratanya ketersediaan guru produktif, dan kompetensi lulusan yang belum optimal dan belum sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja (Sudhirta, 2017).

Kecilnya alokasi biaya untuk kepentingan pelayanan dan peningkatan kualitas belajar mengajar, juga menyebabkan biaya perawatan dan pemeliharaan serta perbaikan fasilitas pendidikan menjadi sangat terbatas. Akibatnya, banyak sekolah dan fasilitas pendidikan yang ada di dalamnya rusak (Rahmawati, 2015), sehingga pelayanan pendidikan kepada peserta didik menjadi tidak optimal. Salah satu bentuk pelayanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik adalah proses pembelajaran. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang tidak baik menyebabkan pelaksanaan proses pembelajaran tidak optimal, sehingga harapan menghasilkan lulusan yang berkualitas sulit diwujudkan. Ini terbukti dengan masih banyaknya peserta didik yang tidak lulus dalam Ujian Nasional (UN), atau banyaknya nilai UN peserta didik yang berada di bawah rata-rata (Rahmawati, 2015, hlm. 17).

Pendidikan kejuruan adalah pendidikan “*Hands on Experience*”, yang menuntut peserta didiknya memiliki pengalaman nyata sesuai keahlian yang dipilihnya (Efendi, 2016). Pengalaman tersebut merupakan bekal bagi peserta didik

Y a y a t, 2019

MODEL PEMBIAYAAN PADA PENDIDIKAN KEJURUAN (*Analisis Biaya Satuan Pendidikan Kejuruan Di SMK yang Berbasis Pada Standar Kebutuhan Kompetensi*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

untuk masuk ke dunia kerja, karena orientasi dari pendidikan kejuruan adalah menyiapkan peserta didik untuk kerja. Orientasi pendidikan kejuruan di SMK adalah menghasilkan lulusan yang siap kerja, SMK diharapkan menjadi solusi dalam mengurangi tingkat pengangguran. Harapan tersebut sulit diwujudkan karena fakta yang ada menunjukkan bahwa lulusan SMK menjadi penyumbang terbesar terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) akibat banyaknya lulusan SMK yang tidak terserap di dunia kerja dan menganggur. Sampai Februari 2017, sebanyak 29,27% jumlah lulusan SMK tidak terserap di Industri dan menganggur, sehingga menjadi penyumbang terbesar terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu sebesar 9,27% (BPS, 2017). Angka TPT tersebut merupakan angka TPT tertinggi dibanding angka TPT dari lulusan lembaga pendidikan yang lain (SD, SMP, SMU, akademi/diploma, dan universitas). Salah satu penyebab banyaknya lulusan yang tidak terserap oleh industri adalah kompetensi yang dimiliki oleh lulusan SMK belum optimal dan belum sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja (Sudhirta, dkk, 2017). Banyaknya jumlah lulusan yang tidak terserap oleh industry dan tingginya angka TPT, mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang dilaksanakan di SMK belum optimal.

Penyelenggaraan pendidikan pada SMK utamanya diarahkan pada penyiapan peserta didik untuk bekerja, sehingga penguasaan keterampilan (keterampilan kerja) oleh setiap peserta didik menjadi yang utama. Keterampilan akan dikuasai peserta didik, apabila peserta didik tersebut mengalami atau melakukan langsung latihan keterampilan tersebut. Di SMK, latihan-latihan keterampilan tersebut diberikan pada saat proses pembelajaran kelompok mata pelajaran produktif atau dalam istilah sekarang dikenal dengan istilah kelompok mata pelajaran keahlian. Kelompok mata pelajaran keahlian merupakan kelompok mata pelajaran yang akan memberikan bekal kemampuan dan unjuk kerja (*performance*) yang dibutuhkan di tempat kerja, baik pengetahuan, sikap, tata nilai, maupun keterampilan. Kelompok mata pelajaran keahlian berisi muatan materi praktik sesuai dengan program dan kompetensi keahlian. Melalui praktik keterampilan, peserta didik akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman langsung (Nugroho, 2012).

Pembelajaran praktik (praktik kejuruan) merupakan bentuk pembelajaran yang dapat memfasilitasi peserta didik dalam menguasai keterampilan kejuruan. Keterampilan kejuruan hanya dapat diajarkan dengan optimal apabila ditunjang dengan keberadaan dan digunakannya peralatan (mesin) yang memadai. Selain jumlah yang memadai, kesamaan dengan peralatan yang akan digunakan pada saat bekerja nanti juga harus diperhatikan. Dua hal tersebut (jumlah dan kesamaan alat yang digunakan) akan menjadikan proses pendidikan kejuruan efektif. Pendidikan kejuruan akan efektif apabila tugas-tugas yang diberikan di dalam latihan memiliki kesamaan operasi, alat dan mesin seperti yang akan digunakan dalam pekerjaannya nanti (Charles Prosser dalam Djatmiko, 2013). Pernyataan dari Prosser tersebut mengindikasikan betapa pentingnya keberadaan peralatan dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan, khususnya dalam pembelajaran keterampilan kejuruan. Selain peralatan, keterlaksanaan pembelajaran praktik kejuruan juga tidak dapat terlepas dari ketersediaan BAHP, khususnya BAHP praktik yang akan digunakan peserta didik pada saat berlatih suatu keterampilan. Pembelajaran praktik kejuruan akan terlaksana dengan optimal apabila didukung oleh ketersediaan peralatan dan BAHP yang memadai.

Penyelenggaraan pendidikan di SMK sudah tentu akan memerlukan biaya lebih besar dibanding dengan pendidikan umum. Penyelenggaraan pendidikan di SMK diarahkan pada proses penguasaan kompetensi untuk kerja, sedangkan pada pendidikan umum diarahkan pada penguasaan kemampuan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Penekanan pembelajaran di SMK pada keterampilan untuk kerja, sedangkan pada pendidikan umum pada pengetahuan untuk bekal melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Proses pendidikan pada pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan praktik, sikap, nilai-nilai, dan pengetahuan lain yang terkait dengan berbagai pekerjaan dalam bidang ekonomi dan kehidupan sosial (Bolina, 1996). Pernyataan Bolina tersebut mengindikasikan bahwa proses pembelajaran pada SMK harus mencakup ketiga aspek secara bersamaan, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Peserta didik SMK yang disiapkan sebagai calon tenaga terampil tingkat menengah. Selain harus menguasai keterampilan kerja, juga harus memiliki

wawasan pengetahuan tentang dunia kerja yang akan menjadi tempat dia bekerja. Oleh karena itu, proses pembelajaran di SMK tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran di kelas, laboratorium, *workshop* atau bengkel yang ada di sekolah, melainkan juga dilaksanakan di luar sekolah (Industri) dalam bentuk Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Praktik Industri (PI). Selain bentuk pembelajaran, idealnya dalam penyelenggaraan program pendidikan di SMK jumlah peserta didik dalam satu kelas/rombongan belajarnya lebih kecil dibanding pendidikan umum. Imbasnya, diperlukan jumlah kelas yang banyak, begitu juga jumlah tenaga pengajarnya.

Pendidikan kejuruan di SMK merupakan pendidikan yang mahal, sebab memerlukan sarana dan prasarana yang harus disesuaikan dengan yang ada di industri (Efendi, 2016). Akibatnya, jumlah biaya yang harus disediakan untuk pendidikan kejuruan harus lebih besar dibanding dengan pendidikan umum. Jumlah biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan kejuruan akan lebih besar dibanding dengan pendidikan umum, terutama untuk jenis pekerjaan yang memerlukan alat berat (Hoeckel, 2008). *“TVET costs more than general education, often much more, because of smaller class sizes for workshops and the costs of equipment, maintenance, and supplies.”* (ADB, 2009, hlm. 4). Biaya pendidikan kejuruan lebih mahal dari pendidikan umum, bahkan jauh lebih mahal, karena ukuran kelas yang kecil (di bengkel) dan biaya untuk peralatan, pemeliharaan, dan penyediaan. Biaya pendidikan yang dibutuhkan pada penyelenggaraan pendidikan kejuruan, seperti SMK meskipun daya tampung kelasnya lebih sedikit adalah sekitar 2-3 kali lipat lebih tinggi dibanding pendidikan umum atau pendidikan yang tanpa praktik (Bolina, 1996; dan Sunarto, 2011). Biaya tersebut digunakan untuk membayar: a) gaji guru/pendidik, b) biaya peralatan, c) biaya infrastruktur, dan d) biaya operasional seperti pembelian bahan/alat praktek, pemeliharaan peralatan, dan pembelian suku cadang pendukung.

Mengingat biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan lebih besar dibanding dengan pendidikan umum atau sosial, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan untuk SMK lebih besar di banding SMA. Melalui Permendiknas No. 69 Tahun 2009, pemerintah telah menetapkan standar biaya operasional non personal untuk setiap siswa SMK lebih besar

**Y a y a t, 2019**

**MODEL PEMBIAYAAN PADA PENDIDIKAN KEJURUAN (Analisis Biaya Satuan Pendidikan Kejuruan Di SMK yang Berbasis Pada Standar Kebutuhan Kompetensi)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dibanding siswa SMA. Sebagai contoh, untuk Program Keahlian Teknik Pemesinan biaya operasional non personal yang ditetapkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp 2.730.000,00 per siswa per tahun, dan untuk setiap siswa SMA (IPA) sebesar 1.010.000,00 per siswa per tahun. Biaya non operasional tersebut dialokasikan untuk biaya: (1) Alat Tulis Sekolah (ATS), dan Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP), (2) pemeliharaan dan perbaikan ringan, (3) biaya daya dan jasa, (4) biaya transportasi/perjalanan dinas, (5) biaya konsumsi, (6) biaya asuransi, (7) biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, (8) biaya uji kompetensi, (9) biaya praktek kerja industri, dan (10) biaya pelaporan. Khusus untuk Kota Bandung dengan Indeks Biaya Pendidikan sebesar 0,913, maka biaya operasional non personalia untuk setiap siswa SMK pada Program Keahlian Teknik Pemesinan adalah Rp 2.492.490,00 per tahun atau sebesar Rp 7.477.470,00 per tiga tahun. Sesuai aturan yang ada, alokasi minimal untuk belanja BAHP adalah sebesar 25% (Rp 623,122.50 per siswa per tahun atau sebesar Rp 1,869,367.50 persiswa per tiga tahun). Biaya tersebut digunakan untuk biaya BAHP pada 17 Mata pelajaran yang harus diikuti oleh setiap peserta didik di SMK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi dan hasil pengamatan penulis di lapangan, mengindikasikan bahwa BAHP yang ada hanya cukup untuk satu kali latihan, sedangkan untuk menguasai suatu jenis keterampilan perlu latihan berkali-kali. Jumlah latihan yang diperlukan setiap peserta untuk dapat menguasai keterampilan pada level respon terbimbing saja diperlukan latihan sebanyak dua kali (Putra, 2018). Sekaitan dengan itu, perlu pengkajian ulang mengenai besarnya biaya operasi yang diperlukan oleh seorang peserta didik agar mampu menyelesaikan pendidikan dan menguasai kompetensi yang ditentukan.

Biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memahami tentang karakteristik keuangan satuan pendidikan dan pengelolaannya (Mingat dan Tan, 1988, hlm. 25; dan Fattah, 2009, hlm. 25). Dalam melakukan perhitungan untuk menentukan besarnya biaya pada pendidikan kejuruan seperti SMK, perlu dipertimbangkan aspek-aspek seperti: 1) kondisi sosial ekonomi masyarakat dimana pendidikan tersebut dilaksanakan, 2) lokasi dimana pendidikan tersebut dilaksanakan (perkotaan atau pedesaan) dan kondisinya (pantai, dataran, atau pegunungan), 3) karakteristik masyarakat yang ada dimana pendidikan

**Y a y a t, 2019**

*MODEL PEMBIAYAAN PADA PENDIDIKAN KEJURUAN (Analisis Biaya Satuan Pendidikan Kejuruan Di SMK yang Berbasis Pada Standar Kebutuhan Kompetensi)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dilaksanakan (usia, jumlah, dan pekerjaan), dan 4) jenis pendidikan kejuruan yang dilaksanakan (Supriadi, 2010, hlm. 45, dan Klein, 2001). Setiap jenis pendidikan kejuruan dan bidang keahlian yang dikembangkan, memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan lainnya, sehingga kebutuhan biaya untuk setiap jenis pendidikan kejuruan dan bidang keahlian tentunya akan berbeda.

Besarnya biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan kejuruan, seperti tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Biaya dari pemerintah pusat diberikan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sedangkan dari pemerintah daerah dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Adapun biaya yang berasal dari masyarakat (orang tua) diberikan dalam bentuk SPP dan DPP yang dikelola oleh komite sekolah. Berdasarkan Lampiran Permendikbud No. 8 Tahun 2017, besaran dana BOS yang diberikan untuk peserta didik SM adalah Rp 1.400.000,-/peserta didik/tahun. Adapun besarnya SPP yang dibebankan pada setiap peserta didik, tergantung pada kebijakan dari masing-masing sekolah. Pada SMK yang penulis jadikan objek riset, besarnya SPP yang dibebankan pada masing-masing peserta didik adalah sama untuk setiap program/kompetensi keahlian dan berlaku tetap mulai dari kelas X sampai kelas XII. Pada saat sekarang (tahun pelajaran 2017/2018), ada dua besaran dana SPP yang dibebankan kepada setiap peserta didik pada semua Program/Kompetensi Keahlian, yaitu Rp 275.000,00 untuk kelas X dan XII, dan Rp 250.000,00 untuk kelas XI. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Besaran Uang SPP Tahun Pelajaran 2017/2018 di SMKN 6 Bandung

No	Program/Kompetensi Keahlian	Jenjang Kelas	Besar SPP (Rp)
1.	Teknik Mesin/Teknik Pemesinan	X	275.000,00
		XI	275.000,00
		XII	250.000,00
2.	Teknik Elektro/Teknik Pemanfaatan Instalasi Tenaga Listrik	X	275.000,00
		XI	275.000,00
		XII	250.000,00

Lanjutan:

1.	Teknik Elektronika/Teknik Audio Vidio	X	275.000,00
		XI	275.000,00
		XII	250.000,00
2.	Teknik Otomotif/Teknik Kendaraan Ringan	X	275.000,00
		XI	275.000,00
		XII	250.000,00
3.	Teknik Bangunan/Teknik Konstruksi Kayu	X	275.000,00
		XI	275.000,00
		XI	250.000,00
4.	Teknik Bangunan/Teknik Gambar Bangunan	X	275.000,00
		XI	275.000,00
		XI	250.000,00

(Sumber: RKAS SMKN 6 dan hasil wawancara dengan wakasek kurikulum).

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen *instrumental input* pendidikan yang sangat penting, sehingga biaya menjadi salah faktor penentu dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas diantaranya dapat dilihat dari kualitas lulusan. Lulusan akan berkualitas apabila dihasilkan dari proses yang berkualitas. Begitu juga dengan proses. Proses akan berkualitas apabila ditunjang dengan ketersediaan komponen input yang memadai (sesuai standar), dan salah satunya adalah biaya (biaya pendidikan). Hal ini sesuai dengan konsep sekolah sebagai sebuah sistem yang setidaknya terdiri atas tiga komponen yang antara satu dengan lainnya saling berhubungan dan saling berpengaruh, yaitu komponen input, process dan hasil (Fattah, 2017, hlm. 66).

Mengingat biaya berkorelasi dan berkontribusi terhadap kualitas proses dan hasil pembelajaran, sudah selayaknya apabila alokasi biaya untuk pelaksanaan proses pendidikan (proses pembelajaran) memiliki porsi yang besar. Dalam kenyataannya, harapan tersebut sulit dicapai karena biaya pendidikan yang ada sebagian besar dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan penyelenggara pendidikan termasuk pendidik (Rahmawati, 2015; dan Kurinawa, 2016). Kenyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Sugandi (2011) yang mengatakan bahwa alokasi biaya untuk pembiayaan kegiatan pembelajaran di SMK, khususnya untuk penyediaan bahan habis pakai sangat kecil, yaitu sekitar 2% dari total anggaran yang diperoleh.

Y a y a t, 2019

MODEL PEMBIAYAAN PADA PENDIDIKAN KEJURUAN (Analisis Biaya Satuan Pendidikan Kejuruan Di SMK yang Berbasis Pada Standar Kebutuhan Kompetensi)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Proses pembelajaran praktik kejuruan atau pembelajaran keterampilan merupakan ciri khas dari proses pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan kejuruan (Mariah, 2012). Proses pembelajaran keterampilan tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan tatap muka di ruang kelas, melainkan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan di luar kelas seperti laboratorium, studio, bengkel atau *workshop*. Pelaksanaan pembelajaran praktik kejuruan memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Pembelajaran keterampilan tidak dapat diajarkan secara optimal apabila peralatan yang digunakan tidak memadai baik jenis, jumlah, maupun kualitas. Begitu juga dengan ketersediaan Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP) yang akan digunakan oleh peserta didik saat berlatih keterampilan. Dengan demikian, pembelajaran praktik keterampilan hanya akan dapat diajarkan secara optimal apabila ditunjang oleh ketersediaan peralatan dan BAHP yang memadai.

Kecilnya alokasi anggaran untuk operasional pembelajaran (pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana pembelajaran) menyebabkan minimnya kepemilikan sarana dan prasarana pembelajaran, serta banyaknya peralatan yang rusak. SMK Negeri 6 Bandung yang merupakan salah satu SMK ternama di Kota Bandung, ternyata ketersediaan peralatan yang digunakan untuk kegiatan praktik peserta didik juga masih belum memadai. Ini terbukti dengan masih adanya alat yang bersifat *Work Station Tunggal* (WST), pada saat proses pembelajaran digunakan oleh lebih dari satu orang (3-5 orang). Kenyataan tersebut menggambarkan bahwa rasio antara mesin dengan peserta didik masih jauh dari rasio standar (Purnawan, 2010). Akibatnya, kesempatan untuk menggunakan mesin dan lamanya waktu peserta didik untuk berlatih keterampilan menjadi berkurang/terbatas. Terbatasnya kesempatan peserta didik untuk berlatih keterampilan, menyebabkan pihak sekolah pada saat akan dilaksanakan uji kompetensi memberikan latihan tambahan kepada setiap peserta didiknya sebanyak 2-3 kali latihan (hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum). Selain terbatasnya alokasi biaya untuk pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana pembelajaran, untuk pengadaan Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP), khususnya BAHP praktik juga terbatas. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pada program keahlian Teknik Pemesinan dan pengamatan langsung

Y a y a t, 2019

MODEL PEMBIAYAAN PADA PENDIDIKAN KEJURUAN (*Analisis Biaya Satuan Pendidikan Kejuruan Di SMK yang Berbasis Pada Standar Kebutuhan Kompetensi*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

di lapangan, ternyata ketersediaan BAHIP untuk keperluan praktik peserta didik terbatas dan disinyalir hanya diproyeksikan untuk keperluan 1 (satu) kali latihan. Padahal, seorang peserta didik untuk dapat menguasai suatu keterampilan diperlukan latihan lebih dari kali, yaitu 2-3 kali latihan (hasil wawancara dengan guru program keahlian Teknik Pemesinan). Jumlah latihan yang diperlukan oleh peserta didik untuk menguasai keterampilan sampai level respon terbimbing saja diperlukan latihan minimal dua kali latihan, sehingga diperlukan ketersediaan bahan habis pakai minimal dua buah (Putra, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa penyelenggaraan pendidikan kejuruan pada satuan pendidikan SMK dihadapkan pada persoalan yang sangat kompleks. Permasalahan tersebut adalah: (1) belum mampunya SMK menghasilkan lulusan yang sesuai tuntutan industri, dan (2) tingginya biaya yang diperlukan. Aspek biaya dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya pada penyelenggaraan pendidikan kejuruan perlu dikaji lebih seksama, karena pendidikan kejuruan berbeda karakteristik dengan pendidikan umum. Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan lebih besar dibanding pendidikan umum. Besarnya biaya yang harus disediakan untuk penyelenggaraan pendidikan (pendidikan kejuruan) perlu direncanakan dan dihitung secara cermat agar dapat memenuhi standar kecukupan.

Saat sekarang, penghitungan biaya pendidikan di SMK masih didasarkan pada jumlah peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Perhitungan biaya seperti itu dikenal dengan istilah sistem penghitungan biaya tradisional atau konvensional. Sistem penghitungan tradisional/konvensional ini memiliki beberapa kelemahan, diantaranya: a) tidak dapat mencerminkan secara benar besarnya pemakaian biaya produksi dan biaya sumber daya fisik (Fattah, 2017, hlmn.98); b) sistem akuntansi tradisional sudah tidak mampu lagi menyediakan informasi tentang keuangan yang diperlukan dalam dunia bisnis, terlebih dengan adanya persaingan global teknologi (Patrick, 2015, hlm. 211), dan c) sistem pembiayaan tradisional atau konvensional dipandang tidak mampu lagi memberikan informasi biaya yang akurat (Lou, 2017, hlm. 41).

Penelitian tentang biaya pendidikan, khususnya di Indonesia telah banyak dilakukan, diantaranya oleh Fattah (2009); Supriadi (2010); Sugiarta (2010);

**Y a y a t, 2019**

*MODEL PEMBIAYAAN PADA PENDIDIKAN KEJURUAN (Analisis Biaya Satuan Pendidikan Kejuruan Di SMK yang Berbasis Pada Standar Kebutuhan Kompetensi)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sugandi (2011); Mukhid (2012); Sanjiwani (2012); Juanda dan Lestari (2012); Alip (2014); dan Azizah dan Sukirno; 2016. Penelitian yang telah dilakukan tersebut masih berorientasi pada perhitungan biaya faktual, yaitu biaya yang saat ini dibayarkan untuk penyelenggaraan program pendidikan.

Bertolak dari paparan di atas, kaitan dengan masalah biaya, saat ini SMK belum mampu secara cermat dan akurat menghitung dan merencanakan besarnya biaya yang sebenarnya diperlukan untuk menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Kuswana (2007) yang menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada sekolah (SMK) yang mampu mengidentifikasi satuan biaya untuk setiap satuan kegiatan pembelajaran, khususnya pembelajaran praktik sesuai dengan tuntutan kompetensi (kompetensi akan sulit dicapai apabila satuan pendidikan tidak dapat mengukur berapa jumlah alat dan bahan praktik yang diperlukan berdasarkan satuan dimensi waktu dan distribusi per mata pelajaran). Pernyataan Kuswana tersebut menyiratkan pesan bahwa dalam menghitung biaya pendidikan seharusnya mengacu pada aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan bukan berdasarkan pada jumlah peserta didik yang ada di sekolah tersebut.

Penghitungan biaya dengan mengacu pada aktivitas pendidikan (aktivitas pembelajaran), akan mampu menghasilkan jumlah biaya yang sesungguhnya diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Penghitungan biaya seperti itu dikenal dengan penghitungan biaya yang berbasis pada aktivitas (*Activity-Based Costing/ABC*). *Activity-Based Costing (ABC)* adalah metodologi pembiayaan yang mengidentifikasi aktivitas dalam organisasi dan membebankan biaya pada setiap aktivitas dengan sumber daya untuk seluruh produk dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan aktual masing-masing (Kannaiah, 2015, hlm. 275). Dengan demikian, penghitungan biaya dengan menggunakan pendekatan ABC lebih menitik beratkan pada aktivitas bukan pada produk. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amir (2012) telah menunjukkan bahwa ABC mampu memperbaiki visibilitas informasi yang memungkinkan manajemen pada suatu organisasi seperti lembaga pendidikan memahami keterkaitan antara biaya dan aktivitas serta mengidentifikasi aktivitas-aktivitas mana yang dapat memberikan nilai tambah dan yang tidak. Dengan demikian, penghitungan biaya berdasarkan aktivitas pendidikan (aktivitas

Y a y a t, 2019

MODEL PEMBIAYAAN PADA PENDIDIKAN KEJURUAN (*Analisis Biaya Satuan Pendidikan Kejuruan Di SMK yang Berbasis Pada Standar Kebutuhan Kompetensi*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pembelajaran) merupakan upaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem penghitungan tradisional/konvensional, karena dalam perhitungannya berangkat dari standar kompetensi lulusan yang di-*breakdown* kepada standar isi, standar proses (aktivitas pembelajaran), dan komponen-komponen biaya per aktivitas yang harus dibiayai. Penghitungan biaya pendidikan dengan mengacu pada aktivitas pendidikan yang dilaksanakan, merupakan gambaran biaya ideal yang harus disediakan agar penyelenggaraan pendidikan kejuruan di SMK dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Kegiatan analisis pembiayaan pada satuan pendidikan, tidak akan terlepas dari dua aspek yang saling berkaitan, yaitu sisi anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan (Fattah, 2009, hlm. 23). Antara penerimaan dan pengeluaran sama-sama memiliki kaitan dengan sumber pembiayaan serta sistem dan mekanisme dalam pengalokasiannya. Dalam melakukan analisis biaya, perlu dilakukan identifikasi dan analisis terhadap: 1) jenis biaya (biaya investasi dan biaya operasional), 2) sifat penggunaan (langsung dan tidak langsung), 3) jenis penggunaan (personal dan non personal), dan 4) sumber pendanaan (pemerintah, pribadi, dan masyarakat). Kajian dalam penelitian difokuskan pada biaya operasional (langsung dan tidak langsung) yang digunakan untuk membayar biaya personal dan non personal dalam penyelenggaraan program pendidikan kejuruan pada Program Keahlian Teknik Pemesinan di SMK Negeri 6 Bandung.

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penghitungan besarnya pembiayaan pendidikan, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro (Fattah, 2009 hlm. 24-25; dan Mingat and Tan, 1988 hlm. 25). Dalam perspektif pendekatan makro, analisis pembiayaan pendidikan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian anggaran pendidikan pada konteks nasional. Adapun dalam perspektif pendekatan mikro, analisis biaya pendidikan diarahkan pada perhitungan biaya satuan dengan didasarkan pada pelayanan pendidikan pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Dalam penelitian ini, analisis pembiayaan difokuskan pada pembiayaan pendidikan dalam tataran mikro, yaitu sekolah atau satuan pendidikan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa proses pendidikan

berlangsung pada tataran sekolah, sehingga akan terungkap informasi tentang sumber daya yang digunakan dan seharusnya dibiayai.

Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan dapat dikelompokkan kedalam biaya investasi dan biaya operasi. Biaya investasi merupakan biaya pendidikan yang dibayarkan oleh satuan pendidikan untuk membayar penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang usia pakainya lebih dari satu tahun. Adapun biaya operasi adalah biaya yang dibayarkan oleh satuan pendidikan untuk membiayai kegiatan operasi institusi atau biaya yang digunakan untuk menyediakan sumber daya pendidikan yang digunakan dalam kurun waktu satu tahun atau kurang. Biaya operasional terdiri atas biaya operasional personal dan non personal. Pada penelitian ini penghitungan biaya lebih difokuskan pada biaya operasional (personal dan non personal) baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dana berbasis sekolah yang dituangkan dalam RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah). Dari basis data tersebut akan diperoleh informasi riil tentang besarnya dana yang diterima dan dikeluarkan oleh sekolah dalam menyelenggarakan program pendidikan. Titik berat pembahasan difokuskan pada seluruh aktivitas dalam pendidikan (akademik dan pendukung). Aktivitas akademik yang dimaksud adalah aktivitas pembelajaran (*learning activity*) yang dilaksanakan baik di sekolah (ruang kelas, laboratorium, studio, dan *workshop*/bengkel) maupun di luar sekolah yaitu di industri dalam bentuk Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Praktek Industri (PI). Adapun aktivitas pendukung adalah aktivitas manajerial dalam penyelenggaraan pendidikan. Komponen biaya yang dihitung adalah komponen biaya personal, dan komponen non personal baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Bertolak dari latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **Model pembiayaan seperti apa yang seharusnya digunakan pada penyelenggaraan pendidikan kejuruan di SMK agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan kompetensi standar?**

Rumusan masalah tersebut, penulis rinci kembali menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

Y a y a t, 2019

MODEL PEMBIAYAAN PADA PENDIDIKAN KEJURUAN (Analisis Biaya Satuan Pendidikan Kejuruan Di SMK yang Berbasis Pada Standar Kebutuhan Kompetensi)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a. Berapa nominal biaya satuan (*unit cost*) per peserta didik faktual yang digunakan untuk membiayai seluruh proses pendidikan kejuruan pada Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan di SMK?
- b. Berapa nominal biaya satuan (*unit cost*) per peserta didik ideal yang harus dibayarkan untuk membiayai seluruh proses pendidikan kejuruan pada Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan di SMK agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan Kompetensi Standar?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini utamanya bertujuan untuk menghasilkan model pembiayaan pendidikan kejuruan pada Program Keahlian Teknik Pemesinan di SMK Negeri 6 Bandung yang berbasis pada kebutuhan kompetensi standar. Adapun secara khusus ditujukan untuk:

1. Mendapatkan angka rata-rata biaya satuan (*unit cost*) faktual yang digunakan untuk membiayai seorang peserta didik dalam mengikuti proses pendidikan kejuruan pada Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan di SMK.
2. Mendapatkan angka rata-rata biaya satuan (*unit cost*) ideal yang diperlukan untuk membiayai seorang peserta didik dalam mengikuti proses pendidikan kejuruan pada Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan di SMK agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan Kompetensi Standar.

Berdasarkan pada tujuan penelitian tersebut, maka produk yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini ialah:

- a. Model perhitungan biaya satuan pendidikan kejuruan di SMK berdasarkan kebutuhan aktual sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang berbasis pada tuntutan kebutuhan kompetensi standar pada Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan di SMK.
- b. Gambaran tentang hitungan biaya satuan per peserta didik faktual yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan pada Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan di SMK berdasarkan tuntutan standar kebutuhan kompetensi.
- c. Gambaran hitungan biaya satuan per peserta didik ideal yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan pada Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan di SMK berdasarkan tuntutan kebutuhan kompetensi standar.

Y a y a t, 2019

MODEL PEMBIAYAAN PADA PENDIDIKAN KEJURUAN (*Analisis Biaya Satuan Pendidikan Kejuruan Di SMK yang Berbasis Pada Standar Kebutuhan Kompetensi*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam:
  - a. Memberikan sumbangan bagi kepentingan akademik pada pengembangan standar pembiayaan satuan pendidikan kejuruan di SMK dalam rangka menghasilkan calon tenaga kerja profesional yang mengacu pada KKNi dan SKKNI.
  - b. Memberikan rujukan bagi peminat untuk melakukan penelitian lanjutan berkenaan dengan pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan untuk jenjang dan jenis pendidikan lain, baik secara makro maupun mikro.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:
  - a. Umpan balik dan sekaligus sebagai bahan evaluasi secara mikro terhadap implementasi kurikulum, dalam pencapaian standar kompetensi oleh peserta didik.
  - b. Bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk menindaklanjuti penerapan standar pembiayaan pada satuan pendidikan kejuruan di SMK dalam mengoptimalkan penguasaan kompetensi oleh peserta didik.
  - c. Bahan masukan bagi para pengelola SMK dalam mengelola proses pendidikan.

#### 1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Disertasi ini terdiri atas lima bab, dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I, berisi bahasan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan disertasi.

Bab II, berisi bahasan mengenai landasan teori, kerangka pikir penelitian dan model konseptual, penelitian terdahulu dan definisi operasional. Landasan teori menguraikan tentang konsep pendidikan kejuruan dan konsep biaya pendidikan.

Bab III, berisi bahasan mengenai metode penelitian. Pada bagian ini, diuraikan tentang desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, prosedur penelitian, dan teknik analisis data

Bab IV, menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, selaras dengan tujuan penelitian.

Bab V, sebagai bagian penutup berisi tentang kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Adapun di bagian akhir berisi tentang daftar pustaka dan lampiran sesuai dengan kepentingan dalam penelitian ini.